

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23, pasal 2, tahun 2014).

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Berdasarkan UU Nomor 23, pasal 2 tahun 2014, tentang pembagian wilayah Negara menyatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi kepada beberapa tingkat daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonom. Setiap pemerintahan wilayah provinsi, daerah, maupun kabupaten/ kota memiliki wewenang sendiri untuk mengatur rumah tangganya dengan membuat peraturan daerah.

Kemampuan dan kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan memperkuat struktur penerimaan daerah, diperlukan suatu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dimana PAD merupakan salah satu tolok ukur kemampuan serta cermin kemandirian daerah. Alokasi berbagai penerimaan PAD menjadi faktor penting dalam peningkatan Derajat Otonomi Fiskal yang pada akhirnya kemandirian keuangan daerah diharapkan dapat meningkat (Elliya dan Muhammad, 2016).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Prinsip *Value for money* merupakan konsep pendekatan pengukuran kinerja biasanya dinyatakan dengan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Ekonomis merupakan pengelolaan secara hati-hati tanpa ada pemborosan, sementara efisiensi ditentukan dengan membandingkan antara jumlah output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan, serta efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai (Mardiasmo (2015).

Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat (Agus, dkk, 2017).

Keberhasilan otonomi daerah umumnya didorong oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) sekaligus berperan sebagai pengelola, kemudian sumber daya alam (SDA), kemampuan keuangan (*financial*) yang dimiliki, kemampuan manajemen untuk mengatur serta mengelola, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis (Nasution, 2018).

Penerapan otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat menentukan alokasi sumber daya ke belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Agar pemerintah daerah mampu menyediakan

pelayanan publik yang memadai, disinilah diperlukan alokasi belanja modal yang lebih tinggi (Eko Indra, 2016).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator keberhasilan suatu daerah dalam mengelola keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat baik ataupun tidak dari kemandirian daerah, efektivitas pemungutan PAD dan efisiensi belanja daerah (Halim, 2012).

Pemerintah daerah tidak hanya mengelola pendapatan asli daerah tetapi juga dana perimbangan yang umumnya jauh lebih besar dari pendapatan asli daerah. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Berdasarkan prosedur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2015, komposisi pendapatan daerah untuk provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia masih di dominasi oleh dana perimbangan yaitu sebesar 55,93%, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar 24,11% dan 19,96%. Hal ini mengindikasikan banyak daerah di Indonesiadalam penyelenggaraan desentraliasi daerah belum optimal (Miftahul. Ilmiyyah, 2017).

Akuntabilitas kinerja berkaitan erat dengan sasaran strategis yang diharapkan dengan jumlah dana yang dialokasikan, jika dana yang dimiliki terbatas maka sasaran perlu diukur dengan tepat serta pengalokasian dana harus transparan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik berpengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi.

Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi disebut transparansi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan

informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Salomi, 2015).

Otonomi daerah di Provinsi Jambi telah dimulai sejak tahun 2001. Adanya desentralisasi ini mendorong gubernur untuk menyerahkan tugas dan wewenang kepada daerah (Kabupaten / kota) untuk menjalankan tugas rumah tangganya sendiri. Tugas-tugas tersebut diberikan kepada Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD, sehingga masing-masing SKPD diharapkan mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah (Meranginkab.go.id).

Kinerja keuangan dapat di ukur dengan melihat realisasi alokasi anggaran pemerintah. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dari perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian tentunya didukung oleh PAD yang tinggi pula Julita, dkk (2012).

Kinerja pemerintahan kabupaten/ kota di Provinsi Jambi dinyatakan baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada beberapa tahun terakhir. Salah satunya Kabupaten Merangin yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa hal yang perlu untuk di perbaiki, yaitu mengenai klasifikasi belanja dan klasifikasi barang milik daerah (BPK.go.id).

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Kabupaten Merangin ialah mengenai rendahnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, serta ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang masih tinggi. Sedangkan Kabupaten Merangin memiliki berbagai potensi alam yang dapat dikelola untuk kepentingan peningkatan pendapatan asli daerah, yaitu berupa tempat destinasi pariwisata berupa keindahan alam, baik area pegunungan dan sungai, serta perkebunan yang dapat menambah pundi-pundi keuangan daerah.

Pengelolaan tempat pariwisata di Kabupaten Merangin telah digalakkan selama beberapa tahun terakhir, dengan dibukanya situs geopark merangin, taman-taman, dan area rekreasi lainnya, serta telah dibuka beberapa tempat pelatihan kerajinan tangan bagi masyarakat yang mana hasil dari karya tersebut akan dijual dan menjadi tambahan bagi pendapatan daerah. Namun, upaya tersebut belum optimal dan masih membutuhkan dorongan dari berbagai pihak agar tercapai peningkatan kesejahteraan. (Meranginkab.go.id).

Kemandirian daerah dapat tercermin dari seberapa besar rasio kemandirian. Jika rasio kemandirian mencapai angka 1 (satu) maka dapat dikatakan suatu daerah itu memiliki kemandirian yang baik. Berikut ini merupakan tabel.1 yang menunjukkan persentase kemandirian daerah beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.

Tabel 1 :
Tingkat Kemandirian Daerah di Beberapa Kabupaten

No	Kabupaten	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer + Pinjaman	Rasio Kemandirian
1	Merangin	95.221.421.001,09	1.372.762.801.010,37	6,93 %
2	Kerinci	108.190.930.000,00	1.256.960.985.581,00	8,6 %
3	Sarolangun	118.828.593.871,64	1.067.495.697.374,80	11,1%
4	Muaro Bungo	153.250.017.630,37	1.692.498.673.105,39	8,9 %

Sumber: olahan output meranginkab.go.id

Tabel.1 menunjukkan persentase kemandirian daerah yang diperoleh dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Merangin adalah 6,9% masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Kerinci yaitu sebesar 8,6%, Kabupaten Sarolangun 11,1 %, dan Kabupaten Muaro Bungo 8,9 %. Maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Merangin memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tiga kabupaten yang ada di sekitarnya. Serta penerimaan PAD paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Pendapatan asli daerah di Kabupaten Merangin didominasi oleh pendapatan dari hasil pertanian dan perkebunan. Hasil perkebunan yang mendominasi pada tahun 2019 adalah berupa kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao dan tembakau. Hasil karet dan kopi merupakan penyumbang terbanyak yaitu sebesar 75.668.000 ton dan 9.141.000 ton ditahun 2019 (BPS dalam angka, 2021).

Indikator yang menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat adalah dari seberapa besar pemberian dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (Jauhar, 2016). Berdasarkan Perppem RI No. 104 tahun 2000 tentang Dana perimbangan menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk daerah provinsi maupun kabupaten dan kota, masing-masing adalah sebesar 10%, sedangkan 90% ditetapkan oleh daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk membantu kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN).

Sistem pengendalian internal (SPI) yang baik sangat diperlukan oleh organisasi. Terutama bagi organisasi yang mengelola sumber daya yang berpotensi terjadinya penyelewengan. SPI yang lemah membuka kesempatan yang lebar untuk terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD), sehingga menimbulkan kritikan oleh lembaga pemantau, dalam hal ini auditor eksternal (Triyadi dan Rasmini, 2016).

Pengendalian internal merupakan suatu tindakan bersifat aktif, yang mengupayakan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Pengendalian internal diterapkan dalam rangka meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mencegah kerugian atas asset, meningkatkan tingkat keandalan dan akurasi data dalam laporan keuangan serta mendorong dipatuhinya hukum dan

peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan (Slamet, 2016).

Pelaksanaan sistem pengendalian intern didalam pemerintahan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kinerja pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Serta dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam membuat pelaporan keuangan, sehingga informasi yang termuat didalam laporan kinerja keuangan dapat tersampaikan dengan baik kepada pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan tersebut.

Berdasarkan UU No.12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, dkk (2014), Nasution (2018), dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nasution (2018), hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Stevani, dkk (2019), yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, berarti semakin menurunnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah maka semakin menurun kinerja pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu lainnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dilakukan oleh Netty (2014), dan Nyanyu (2017), yang menyatakan bahwa pengendalian internal dan motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Begitu pula dengan opini audit, ukuran legislative, *intergovernmental revenue*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan tingkat lemandirian daerah.

Berdasarkan hasil penelitian lainnya, yang dilakukan oleh Eviniar dan Priyo (2020), bahwa terdapat lima faktor yang menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah, diantaranya adalah tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, pendapatan pajak daerah, dan temuan audit.

Penelitian yang dilakukan Slamet, dkk (2016), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, kemudian berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Maluku Utara, serta pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Maluku Utara.

Rasio Derajat desentralisasi fiskal di Provinsi Jambi dapat dikategorikan sangat rendah, serta masih tingginya rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi, begitu juga dengan rasio kemandiriannya masih sangat rendah/ minim (Nurfitri, dkk, 2020),

Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu (Lucy dan Husaini, 2013). Sedangkan menurut Firmansyah, Muhtar, dan Lukman (2018), akuntabilitas memiliki

pengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan menggunakan konsep *Value for money*.

Penelitian Safwan (2014) mengenai pengaruh kompetensi terhadap kinerja keuangan daerah menyatakan bahwa kompetensi dan motivasi secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Sedangkan, menurut penelitian Siti Aisyah (2020), menyatakan bahwa terdapat pengaruh kompetensi aparat terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Faktor lainnya yang akan di pilih untuk peneliti uji ialah mengenai budaya organisasi. Penelitian terdahulu telah banyak yang meneliti mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Endang (2016), Suryadi (2016), Dimas (2016), Jamaludin (2017), serta Juan Menga, dkk (2019). Hasil penelitian secara keseluruhan menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel budaya organisasi terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan faktor-faktor apa saja yang dapat merefleksikan pengaruh variabel endogen dan variabel eksogen didalam variabel akuntabilitas, transparansi, budaya organisasi, kompensasi, sistem pengendalian internal, dan pengelolaan keuangan, serta melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah. Sehingga dengan adanya penelitian ini, pemerintah Kabupaten Merangin dapat meningkatkan kinerjanya dengan memperbaiki faktor-faktor penentu keberhasilan kinerja pemerintah yang belum optimal.

Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena mengingat bahwa kabupaten merangin merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya yang banyak, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan lainnya, namun jika dilihat dari perspektif

pendapatan asli daerah masih dikatakan rendah, jika dibandingkan dengan kabupaten Sarolangun yang pada awalnya adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Sarko. Kemudian peneliti berharap supaya dengan adanya penelitian ini, maka akan diketahui sejauhmana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan.

Lokasi penelitian yang peneliti pilih ialah di seluruh organisasi perangkat daerah atau yang disingkat dengan OPD di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena akses informasi mengenai kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan mudah, dan Kabupaten Merangin memiliki hasil kinerja yang cukup baik jika dilihat dari opini audit. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang telah di paparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian makadirumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Akuntabilitas mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Merangin ?
2. Bagaimanakah Transparansi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Merangin ?
3. Bagaimanakah Budaya Organisasi mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin ?
4. Bagaimanakah Sistem pengendalian internal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin ?

5. Bagaimanakah Kompetensi Aparat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin ?
6. Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparan, dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Merangin.
2. Untuk menganalisis pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Merangin.
3. Untuk menganalisis pengaruh Budaya organisasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Merangin.
4. Untuk menganalisis pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Merangin.
5. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Merangin.
6. Untuk menganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab. Merangin.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Bidang Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi bagi lingkup akademik yang dapat dijadikan sumber informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan ialah supaya menjadi sumbangan teori dan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa maupun alumni yang akan meneliti mengenai permasalahan yang serupa pada masa yang akan datang.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dalam bersosialisasi dengan orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini, serta khususnya menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah di Kabupaten Merangin.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat member sumbangsih serta saran yang membangun bagi aparat pemerintah di kabupaten dalam pelaksanaan kinerja serta pengelolaan keuangan agar dapat selalu memberikan hasil yang baik dan membangun daerah untuk lebih maju.